



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2025

PERUBAHAN RENJA 2025

Perubahan Rencana Kerja 2025



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Juli 2024
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Alla SWT Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Dokumen ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat RENJA.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Satuan Polisi Pamong Praja, yang disusun berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dan menjadi Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam RENJA dapat tercapai sesuai target perencanaan.

Kebumen, 26 Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



IRSA PRATIWI, S.H., M.Ec.Dev.
Pembina / IV a
NIP. 19800417 200604 2 015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
D. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd.....	27
E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	38
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	39
C. Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
BAB V PENUTUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2023 14

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencairan Renstra
Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 Kabupaten Kebumen 24

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kab.Kebumen..... 25

Tabel 2.4 Rincian Kasus sesuai Perda yang ditegakkan s.d Triwulan II tahun 2024 26

Tabel 2.5 Perbandingan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hasil Analisis
Kebutuhan..... 28

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran OPD Satpol PP Pada Tahun 2025 39

Tabel 4.1 Renja dan pendanaan Satpol PP Kabupaten Kebumen Tahun 2025 42

Tabel 4.2 Renja OPD Satpol PP Tahun 2025 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Satuan Polisi Pamong Praja, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, proses *top-down* dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap

memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143), Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Peencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184).

C. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan dari Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Perubahan RenjaSatuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Tahun 2024 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja Tahun 2025. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Capaian kinerja Renja Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian kegiatan tahun 2023 dengan total Anggaran Rp.17.746.933.698,- (100%) terealisasi sebesar Rp.16.865.580.946,- (95,03%) atau deviasi 4,97%. Sedangkan Tahun 2024 yang merupakan tahun periode ketiga RPJMD 2022-2026, total anggaran Rp.21.199.267.000,- (100%) capaian realisasi keuangan dan fisik sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.8.612.392.824,- (40,63%). Berikut rincian

Capaian Realisasi kegiatan-kegiatan di tahun 2023 dan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, serta capaian Renstra adalah sbb :

1. Capaian Realisasi Keuangan Kegiatan Tahun 2023

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 12.000.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp. 11.981.800,- (99,98%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,15%.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 12.000.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp. 11.959.200 (99,85%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,34%.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp.5.592.520.171,- (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.5.139.659.804,- (91,90%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 8,10%.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp.38.400.000,-(100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.38.382.400,- (99,95%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,05%.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
anggaran Rp.330.892.000,- dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.329.232.800,- (99,50%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,50%.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
anggaran Rp.9.600.000,- dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.9.562.400,- (99,61%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,39%.

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD anggaran Rp.2.400.000,- dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp. 2.377.600,- (99,07%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,93%.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran Rp.40.400.000,- dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.40.387.600,- (99,97%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,03%.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 12.000.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.11.998.500 (99,99%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,01%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 1.200.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.1.196.000 (99,67%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,33%.
 - Penyediaan Bahan/Material Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 12.000.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.11.942.550 (99,52%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,48%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 38.144.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.37.163.903,- (97,43%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 2,57%
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 40.000.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.39.957.000 (99,89%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,11%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 1.200.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.1.200.000 (100%), maka tidak terjadi deviasi pada realisasi tersebut.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 60.000.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.56.046.076 (93,41%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 6,59%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 28.800.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.28.782.600,- (99,94%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,06%.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 314.321.500 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.313.983.215,- (99,66%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,34%.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 16.000.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.15.946.000 (99,66%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,34%.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 60.000.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.59.877.000 (99,80%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,20%.

B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp.4.350.311.500,- (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.4.273.854.341,- (98,24%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 1,76%.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 1.528.528.000,- (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar

Rp.1.321.030.600,- (86,43%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 13,57%.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 76.400.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.75.972.700,- (99,44%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,56%.

- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp.1.157.380.000,- (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.1.157.194.150,- (99,98%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,02%.

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

- Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali kota

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp38.087.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.37.980.120,- (99,72%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,28%.

- Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 29.380.000 (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.29.289.000,- (99,69%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,31%.

- Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PNS

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.9.776.469,- (97,76%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 2,24%.

C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 3.185.525.000,- (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.3.076.427.844,- (96,58%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 3,42%.

- Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp.55.000.000,- (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.54.911.600,- (99,92%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,08%.

2) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp.21.776.000,- (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.21.759.600,- (99,92%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 0,08%.

3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 29.920.000,- (100%) dan sudah terealisasi hingga akhir 2023 sebesar Rp.29.549.000,- (98,76%), maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut sebesar 1,24%.

Pada tahun 2023, capaian terbawah ada pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dimana capaian/realisasi sampai triwulan ke IV yaitu 86,43% (Kriteria tinggi). Sedangkan capaian tertinggi ada pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dapat terserap secara maksimal yakni 100%. Selengkapnya capaian realisasi kegiatan T.A 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 2.1

CAPAIAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	DEV.
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.12.000.000,-	Rp.11.981.800,-	99,85	0,15
	1.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.12.000.000,-	Rp.11.959.200,-	99,66	0,34
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.5.592.520.171,-	Rp.5.139.659.804,-	91,90	8,10
	1.2.02.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.38.400.000,-	Rp.38.382.400,-	99,95	0,05
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.2.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.330.892.000,-	Rp.329.232.800,-	99,50	0,50
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.9.600.000,-	Rp.9.562.400,-	99,61	0,39
	1.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.2.400.000,-	Rp.2.377.600,-	99,07	0,93
	1.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.40.400.000,-	Rp.40.387.000,-	99,97	0,03
	1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.12.000.000,-	Rp.11.998.500,-	99,99	0,01
	1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.1.200.000,-	Rp.1.196.000,-	99,67	0,33
	1.2.06.7 Penyediaan Bahan/Material	Rp.12.000.000,-	Rp.11.942.550,-	99,52	0,48
	1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.38.144.000,-	Rp.37.163.903,-	97,43	2,57
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.40.000.000,-	Rp.39.957.000,-	99,89	0,11
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.1.200.000,-	Rp.1.200.000,-	100	0,00
	1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.60.000.000,-	Rp.56.046.076,-	93,41	6,59
	1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.28.800.000,-	Rp.28.782.600,-	99,94	0,06
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.314.321.500,-	Rp.313.983.215,-	99,89	0,11

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	DEV.
	1.2.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.16.000.000,-	Rp.15.946.000,-	99,66	0,34
	1.2.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.60.000.000,-	Rp.59.877.000,-	99,80	0,20
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.2.01.1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Rp.4.350.311.500,-	Rp.4.273.854.341,-	98,24	1,76
	2.2.01.4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.1.528.528.000,-	Rp.1.321.030.600,-	86,43	13,57
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.2.01.5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp.76.400.000,-	Rp.75.972.700,-	99,44	0,56
	2.2.01.6 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.1.157.380.000,-	Rp.1.157.194.150,-	99,98	0,02
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.2.02.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp.38.087.000,-	Rp.37.980.120,-	99,72	0,28
	2.2.02.2 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp.29.380.000,-	Rp.29.289.000,-	99,69	0,31
	2.2.02.3 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp.642.748.527,-	Rp.616.199.674,-	95,87	4,13
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	2.2.03.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp.10.000.000,-	Rp.9.776.469,-	97,76	2,24
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.2.01.2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.185.525.000,-	Rp.3.076.427.844,-	96,58	3,42

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	DEV.
	4.2.01.3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp.55.000.000,-	Rp.54.911.600,-	99,84	0,16
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	4.2.02.1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp.21.776.000,-	Rp.21.759.600,-	99,92	0,08
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	4.2.04.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp.29.920.000,-	Rp.29.549.000,-	98,76	1,24
JUMLAH		Rp.17.746.933.698,-	Rp.16.865.580.946,-	95,03	4,97

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 tidak terdapat Kegiatan atau Sub Kegiatan yang capaian realisasinya masuk pada kriteria sedang dan rendah. Capaian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, dan sebagai faktor pendorong adalah adanya koordinasi yang baik antar unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja serta kepatuhan dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Tahun 2024

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 9.426.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.8.826.000,- (93,63%) dan telah terealisasi secara keuangan sebesar 8.726.500,- (92,58%) dan secara fisik 92,58%. Maka terdapat deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan sebesar 1,05 % dan 1,05 % secara fisik.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Anggaran sub kegiatan ini dengan total sebesar Rp.10.821.000,-(100%) dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.6.468.200,- (59,77%) dan sudah terealisasi secara keuangan sebesar Rp.6.229.100,- (57,56%) dan secara fisik 57,56%. Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 2,21%.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 5.176.967.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.3.161.005.900,- (60,78%) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp.2.815.980.921,- (54,39%) sehingga terdapat deviasi keuangan dan fisik sebesar 6,39%.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 29.230.000,- dan target capaian keuangan dan fisik sampai triwulan II ini sebesar Rp. 14.533.900 (49,72%) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp. 14.499.400,- (49,60%) sehingga terdapat deviasi keuangan dan fisik sebesar 0,12%.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp.165.498.000,- dan target capaian keuangan dan fisik sampai triwulan II ini sebesar Rp.164.018.000,-(100%) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp.158.633.000,- (95,85%) sehingga terjadi secara keuangan dan fisik sebesar 3,26 %.

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp.25.000.000,- dan target capaian keuangan dan fisik sampai triwulan II ini sebesar Rp.25.000.000,- (100%) dan telah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp.24.918.400,- (99,67%) sehingga terdapat deviasi secara keuangan dan fisik sebesar 0,33 %.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp.9.600.000 dan target capaian keuangan dan fisik sampai triwulan II ini sebesar Rp.4.928.000,- (51,33%) dan sudah terealisasi secara keuangan dan

fisik sebesar Rp.4.861.000,- (50,64%) sehingga terdapat deviasi realisasi keuangan dan fisik sebesar 0,69%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 24.232.000,- dan target capaian fisik dan keuangan sampai triwulan II ini sebesar Rp.23.907.000,-(98,66%) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp.23.889.600,-(98,59%) terdapat deviasi secara keuangan dan fisik sebesar 0,07%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp.9.000.000 dan target capaian fisik dan keuangan sampai triwulan II ini sebesar Rp.4.642.100,- (51,58%) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp.4.622.900,- (51,37%) sehingga terjadi deviasi secara keuangan dan fisik sebesar 0,21%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp.1.200.000,- dan target capaian fisik dan keuangan sampai triwulan II ini sebesar Rp.600.000 (50,00 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp.600.000 (50,00%) dan tidak ada deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 10.561.000,- dan target capaian keuangan dan fisik sampai triwulan II ini sebesar Rp.6.486.500,- (61,42%) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp.6.324.450,- (59,89%) sehingga terdapat deviasi pada realisasi secara keuangan dan fisik sebesar 1,53%.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 22.500.000 dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.13.516.000,-(60,07%) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp. 12.881.244 (57,25%) sehingga terdapat deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 2,82%.

- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 2.085.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.1.845.000,- (88,49 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp.1.842.000,-

(88,35%) sehingga terdapat deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 0,14%.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 1.500.000 dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.850.000,- (56,67 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp.850.000,- (50%), sehingga tidak terdapat deviasi.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 60.000.000 dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.54.860.000 (91,43 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp.42.012.029,- (70,02%) sehingga terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 21,41%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 28.800.000,- (100%) dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.12.519.800,- (43,47 %) dan sudah terealisasi secara keuangan sebesar Rp.12.381.400,- (42,99%). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 0,48%.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp.215.084.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.89.933.600,- (41,81 %) dan sudah terealisasi secara keuangan sebesar Rp.89.195.530,- (41,47%). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 0,34%.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 20.000.000 dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.8.131.900,- (40,66 %) dan sudah terealisasi secara keuangan sebesar Rp.8.129.000,- (40,65%). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 0,01%.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 40.000.000 dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.40.000.000 (100 %) dan sudah terealisasi secara keuangan sebesar Rp.39.996.738,- (99,99%). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 0,01%.

B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 5.786.159.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp. 2.320.841.047,- (40,11%) dan sudah terealisasi secara keuangan sebesar Rp.2.260.505.044,- (39,07%). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 1,04%.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 157.861.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp. 115.861.000,- (73,39 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp. 73.373.400,- (46,48 %). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 26,91 %.

- Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 1.375.219.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp. 614.021.800,- (44,65 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp. 608.030.028,- (44,21%). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 0,44%.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 5.075.270.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp. 1.302.502.500,-

(25,66 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp. 1.240.037.956,- (24,43 %). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 1,23 %.

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

- Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 38.782.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp. 17.111.000,- (44,12 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp. 16.112.128,- (41,55%). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 2,57%.

- Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Wali/Kota

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp.22.471.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp. 10.260.000,- (45,66 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp. 9.454.850,- (42,08%). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan sebesar 3,58 %.

- Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 480.307.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp. 192.181.600,- (40,01 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp. 172.444.191,- (35,90 %). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan sebesar 4,11%.

3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp.7.275.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp. 2.910.000,- (40,00%) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp. 1.894.400,- (26,04%). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 13,96 %.

C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 2.249.869.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp.761.966.000 (44,65%) dan sudah terealisasi secara keuangan sebesar Rp.723.971.252 (42,42%) dan secara fisik 42,75%. Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan sebesar 2,23% dan 1,90% secara fisik.

- Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 50.000.000 dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp. 948.212.500,- (42,15 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp. 898.423.427,- (39,93%). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan sebesar 2,22%.

2) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Anggaran sub Kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 17.954.000,- dan target capaian sampai triwulan II ini sebesar Rp. 16.122.000,- (89,80 %) dan sudah terealisasi secara keuangan dan fisik sebesar Rp. 14.859.250,- (82,76%). Maka terjadi deviasi pada realisasi tersebut secara keuangan dan fisik sebesar 7,04 %.

3. Pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satuan Polisi Pamong Praja)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Target/Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	01	2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,3 %	60 %
1	05	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	65 dok	13 dok	13 dok	13 dok	100%	13 dok	38 dok	60 %
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun; Renja, RKA (P),RKO/Rencana Aksi (P), DPA (P)	35 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7/7 dok	21 dok	60 %
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah (Lap.SKM (TWI,TWII), LKJIP, LKPJ, SAKIP, LPPD)	30 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6/5 dok	17 dok	56,6 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satuan Polisi Pamong Praja)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Target/Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,2 %
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Satpol PP Kabupaten Kebumen	50 x 5 =250 orang	50 orang	49 orang	49 orang	100%	49/49 orang	148 orang	59,2 %
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi SKPD	12GU+1TU=13 dok x 5 =65 dok	13 dok	13 dok	15 dok	115,3%	13/11 dok	39 dok	60%
1	05	01	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	60%
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas bagi ASN dan Non ASN Satpol PP dan Damkar	1075 stel	215	215	215	100 %	215/215 stel	645 stel	60%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP Satlinmas dan Damkar yang mendapatkan pelatihan	980 orang	196	196	196	100%	196/196 orang	588 orang	60%
				Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	360 orang	266 orang	34,6%
1	05	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39,4%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satuan Polisi Pamong Praja)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Target/Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pemenuhan kebutuhan belanja alat listrik untuk induk dan 3 pos damkar	20 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	12 jenis	60%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12/6 bulan	30 bulan	50%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12/6 bulan	30 bulan	50%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	5 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	3 jenis	60%
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK Kegiatan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12/6 bulan	30 bulan	50%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pemenuhan rapat-rapat konsultasi ke luar daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12/6 bulan	30 bulan	50%
				Penatausahaan Arsip Dinamis dan SKPD	- Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12/6 bulan	30 bulan	50%
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terlaksanannya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satuan Polisi Pamong Praja)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Target/Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan paket penyediaan jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12/6 bulan	30 bulan	50%
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemenuhan belanja jasa telepon, air dan listrik untuk 3 pos damkar dan 1 induk	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12/6 bulan	30 bulan	50%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12/6 bulan	30 bulan	50%
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terlaksannnya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225 unit	45 unit	45 unit	45 unit	100%	45 unit	135 unit	60%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket service peralatan, printer komputer dan laptop, 1 paket	100 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	60 unit	60%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor tercukupi pemeliharaannya	24 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	12 unit	50%
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Presentase terlaksannya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satuan Polisi Pamong Praja)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Target/Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					- Presentase terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal								
1	05	02	2.0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksannya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	25 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60 %
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	- Jumlah bulan terbayarnya bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan - Jumlah bulan terbayarnya bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan bagi 7 PTT - Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli, penertiban dan pengawalan bupati - Jumlah orang PTT terbayar honorariumnya - Jumlah orang tenaga Banpol terbayar honorariumnya	60 bulan; 1250 kegiatan; 490 orang	12 bulan; 250 kegiatan; 98 orang	12 bulan; 250 kegiatan; 98 orang	12 bulan; 250 kegiatan; 98 orang	100%	12 bulan; 250 kegiatan; 98 orang	36 bulan; 750 kegiatan; 294 orang	60%
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satlinmas meningkat kapasitasnya	7 kegiatan; 300 orang	1 kegiatan; 60 orang	2 kegiatan; 60 orang	2 kegiatan; 60 orang	100%	2/2 kegiatan; 60/60 orang	5 kegiatan; 180 orang	71,4 %
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	- Jumlah anggota Satlinmas meninggal yang mendapat Santunan - Jumlah anggota Satlinmas dan kasi trantib yang terlatih siaga kebencanaan pada tiap kecamatan	10 kegiatan; 85 orang	2 kegiatan; 17 orang	2 kegiatan; 17 orang	2 kegiatan; 17 orang	100%	2 kegiatan; 17 orang	6 kegiatan; 51 orang	60%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satuan Polisi Pamong Praja)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Target/Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pengamanan hari-hari besar dan tahun baru	15 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	9 kegiatan	60%
1	05	02	2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase terlaksananya kegiatan upaya tindak kriminal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50 %
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Sosialisasi/ penyuluhan/ pembinaan perda dan atau perkara untuk masyarakat/ badan hukum/ badan usaha yang rawan melanggar perda dan/ atau perkara	120 kali	24 kali	24 kali	24 kali	100%	12/24 kali	60 kali	50 %
				Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda, dan/ atau perbup untuk masyarakat/ badan hukum/ badan usaha	180 kali	36 kali	36 kali	36 kali	100%	18/36 kali	90 kali	50 %
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Persentase penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,3%	83,3%
1	05	02	2.0 3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	5 kegiatan	1 kegiatan	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg	60%
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang terbina dan terberdayakan	50 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	10 orang	30 orang	60%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satuan Polisi Pamong Praja)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Target/Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	- Respon time pemadaman kebakaran - Kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	69,23%	69,23%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	500%	100%	100%	100%	100%	50/100%	250 %	50%
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah bulan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan THL Damkar yang terbayar - Jumlah terpenuhinya operasional pelayanan pemadaman kebakaran - Jumlah THL Damkar terbayar honorariumnya	60 bulan 335 orang	12 bulan 67 orang	12 bulan 67 orang	12 bulan 67 orang	100%	6/12 bulan 67 orang	30 bulan 67 orang	50%
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah bulan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	6/12 bulan	30 bulan	50%
1	05	04	2.0 2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	persentase terlaksananya kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	500%	100%	100%	100%	100%	50/100%	250%	50%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satuan Polisi Pamong Praja)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Target/Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah wilayah kecamatan yang dilakukan pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	130 kecamatan	26 kecamatan	26 kecamatan	26 kecamatan	100%	13/26 kecamatan	65 kec	50%
1	05	04	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase terlakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	20%
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang dibina melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	400 orang; 25 kecamatan	80 orang; 5 kecamatan	80 orang; 5 kecamatan	80 orang; 5 kecamatan	100%	80 orang; 5 kecamatan	200 orang; 15 kecamatan	50%

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.

Pada tahun 2024 indikator target capaian IKU OPD adalah Presentase Penanganan Pelanggaran Perda. Adapun capaian kinerja kasus pelanggaran Perda tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	
1.	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
		Presentase warga negara terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
			Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
			Presentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.	Presentase Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran			69,23 %	69,23 %	73,07 %	73,07 %	69,23 %	69,23 %	73,07 %	73,07 %	-
		Presentase Tingkat Waktu tanggap (<i>Response Time</i>) 15 Menit Penanganan Kejadian Kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
			Waktu tanggap (<i>Response time</i>) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	-
			Presentase pelayanan penyelamatanandan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Adapun rincian capaian penegakan perda dan perkada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4
RINCIAN KASUS SESUAI PERDA YANG DITEGAKKAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	DASAR HUKUM	JENIS	CAPAIAN	KETERANGAN	TER-SELESAIKAN
1.	Perda Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pasangan yang bukan suami istri di kamar hotel, kamar kos, rumah, dan/ atau tempat penginapan lainnya	52 orang	orang	100%
		Penertiban PGOT	63 Kegiatan	13 orang pengamen, 2 manusia silver, 99 anak punk, 10 orang badut, 14 ODGJ, 11 orang pengemis	100%
		Penertiban PKL	23 kegiatan	144 Pedagang	100%
		Penertiban Reklame	19316	reklame	100%
		Pengawasan Terkait Izin Usaha	27 Kegiatan	Kegiatan	100%
		Operasi Cukai	16 Kegiatan	Kegiatan	100%
2.	Perda Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel	Pajak Hotel	8 Hotel	Hotel	100%

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2023 berdasarkan angka Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 adalah 93,96 poin. Penilaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan 2022 yang berada pada angka 88,88 poin dan 91,93 poin. Namun demikian terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan dimaksud antara lain:

- 1. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Kebumen terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 2. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya dukungan dari instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah;

3. Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
4. Belum meratanya pemahaman tugas pokok dan fungsi aparat Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam rangka penegakan perda dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Belum optimalnya sistem penegakan perda secara preventif membangun kesadaran hukum masyarakat;
6. Waktu tanggap pemadam kebakaran 15 menit masih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.

Berkaitan dengan isu-isu penting serta kendala permasalahan yang akan dihadapi, maka diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi serta melakukan upaya kerjasama antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada.
2. Menambah jumlah PPNS melalui usulan Diklat PPNS.
3. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan ketrampilan dan kesamaptaaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
4. Memaksimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan trantibum dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.
5. Penambahan pos pemadam kebakaran baru di wilayah Kebumen bagian utara.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD kabupaten/ kota disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten/ Kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Tabel. 2.5
Perbandingan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hasil Analisis Kebutuhan

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	8.923.720.700,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	8.839.343.700,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13 dokumen	30.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13 dokumen	30.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20.000.000,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	10.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	10.000.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	100 %	5.322.020.700,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	100 %	5.322.020.700,00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	5.294.020.700,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	5.294.020.700,00	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28.000.000,00	

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	380.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	417.423.000,00	
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	345 Paket	165.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	345 Paket	165.000.000,00	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	345 Orang	215.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	345 Orang	252.423.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100 %	165.200.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100 %	185.200.000,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	137 Paket	9.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	137 Paket	9.000.000,00	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1064 Paket	24.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1064 Paket	24.000.000,00	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2390 Paket	9.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2390 Paket	9.000.000,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	
11	Penyediaan Bahan/Material	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	203 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	203 Paket	10.000.000,00	

12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	110.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	130.000.000,00	
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	2.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	2.000.000,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional	100 %	2.155.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional	100 %	1.940.000.000,00	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2.115.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.900.000.000,00	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	40.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	40.000.000,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	141.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	156.700.000,00	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	207 Laporan	1.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	207 Laporan	6.700.000,00	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	120.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	120.000.000,00	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	30.000.000,00	

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	730.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Presentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	788.000.000,00	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	240.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	240.000.000,00	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	20.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	20.000.000,00	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	470.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	528.000.000,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penegakan Perda	100,00 %	9.235.634.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penegakan Perda	100,00 %	6.223.497.616,00	
8	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5 kegiatan	8.684.074.000,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5 kegiatan	5.636.144.000,00	
22	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1.330.320.000,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1.684.060.000,00	

23	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 Orang	75.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 Orang	75.000.000,00	
24	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan kejahatan	1 Dokumen	1.383.356.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan kejahatan	1 Dokumen	1.383.356.000,00	
25	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan	5.895.398.000,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan	2.493.728.000,00	
9	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal	3 kegiatan	541.560.000,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal	3 kegiatan	577.353.616,00	
26	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	38.782.000,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	66.583.000,00	

27	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	480.307.000,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	488.299.616,00	
28	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	22.471.000,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	22.471.000,00	
10	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota	1 kegiatan	10.000.000,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota	1 kegiatan	10.000.000,00	
29	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	10.000.000,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	10.000.000,00	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Kesiapsiagaan Damkar	76,92 %	148.437.000,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Kesiapsiagaan Damkar	76,92 %	1.486.178.384,00	

11	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/kota	100 %	97.483.000,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/kota	100 %	1.422.920.384,00	
30	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	43.791.000,00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.213.355.384,00	
31	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	53.692.000,00	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	209.565.000,00	
12	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase terlaksananya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 %	17.954.000,00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase terlaksananya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 %	17.954.000,00	
32	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	15 Dokumen	17.954.000,00	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	15 Dokumen	17.954.000,00	

13	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	33.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	45.304.000,00	
33	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	33.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	45.304.000,00	
					18.307.791.700,00					16.549.019.700,00	

Rumusan program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal Renja telah diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, namun demikian terdapat program dan kegiatan besarannya berbeda, ada beberapa Sub Kegiatan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan pagu anggaran. Penurunan dan kenaikan anggaran ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang telah diperhitungkan.

Beberapa anggaran Sub Kegiatan menurun adalah sbb:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari Rp.2.115.000.000,- menjadi Rp.1.900.000.000,- atau menurun Rp.215.000.000,-. Hal ini dikarenakan pengurangan beberapa belanja yang tidak diperlukan.
2. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dari Rp.5.895.398.000,- menjadi Rp.2.493.728.000,- atau menurun Rp.3.401.670.000,- yang disebabkan pemindahan Upah/gaji P2K ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kebumen.

Sedangkan anggaran Sub Kegiatan yang mengalami kenaikan adalah :

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari Rp.215.000.000,- menjadi Rp.252.423.000,- atau naik Rp. 37.423.000,-. Kenaikan ini untuk membiayai peningkatan kapasitas anggota Pemadam Kebakaran dalam rangka mengikuti lomba antar anggota Damkar tingkat nasional.
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari Rp.110.000.000,- menjadi Rp.130.000.000,- atau naik Rp.20.000.000,- dikarenakan penambahan perjalanan dinas pimpinan dalam rangka menghadiri HUT Satpol PP.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari Rp.1.500.000,- menjadi Rp.6.700.000,- atau naik Rp.5.200.000,-. Kenaikan ini merupakan anggaran tambahan pengiriman surat menyurat kegiatan penegakan perda.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari Rp.20.000.000,- menjadi Rp.30.000.000,- atau naik Rp.10.000.000,-
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari Rp.470.000.000,- menjadi Rp.528.000.000,- atau naik Rp.58.000.000,- menyesuaikan dengan kebutuhan perbaikan tempat parkir kantor meliputi pengaspalan dan pemasangan kanopi.

6. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Rp.1.330.320.000,- menjadi Rp.1.684.060.000,- atau naik Rp.353.740.000,- . Kenaikan ini menyesuaikan kebutuhan anggaran pengamanan Pemilihan Umum.
7. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dari Rp.38.782.000,- menjadi Rp.66.583.000,- atau naik Rp.27.801.000,-
8. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah dari Rp.480.307.000,- menjadi Rp.488.299.616,- atau naik Rp.7.992.616,-
9. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dari Rp.43.791.000,- menjadi Rp.1.213.355.384,- atau naik Rp.1.169.564.384,-. Hal ini dikarenakan penambahan anggaran perjalanan dinas anggota Damkar mengikuti Lomba ketrampilan/Skill Damkar.
10. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dari Rp.53.692.000,- menjadi Rp.209.565.000,- atau naik Rp.959.999.384,-
11. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dari Rp.33.000.000,- menjadi Rp.45.304.000,- atau naik Rp.959.999.384,-

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program/Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Tidak ada usulan Musrenbang (Partisipatif) yang masuk untuk Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025.

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah dilakukan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yang dianggap paling relevan mengingat pengelolaan Satpol PP di tingkat pusat di bawah kendali Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam Renstra Kementerian dalam Negeri Tahun 2020-2024 ada beberapa target dan merupakan sasaran yang memerlukan dukungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Persentase daerah dengan manajemen SDM Satuan Polisi Pamong Praja dengan kategori baik;
2. Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Polisi Pamong Praja;
3. Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Persentase daerah yang Satuan Polisi Pamong Praja -nya telah menegakkan perda secara efektif;
6. Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
7. Persentase daerah yang telah menyelenggaraan perlindungan masyarakat secara optimal;
8. Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum;
9. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub Bidang Kebakaran;
10. Persentase daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi;
11. Persentase daerah yang memenuhi standardisasi Sarpras Pemadam Kebakaran dan penyelamatan;
12. Persentase daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan (pencegahan kebakaran, penanganan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat) sesuai standar;
13. Jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) di bidang kebakaran; Layanan damkar sesuai standar di daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi Kepala Daerah yang ke 5 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat”.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025, maka Tujuan dan sasaran OPD Satpol PP pada tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN OPD SATPOL PP PADA TAHUN 2025

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Tahun 2025 pada RPJMD	Target Tahun 2025
Tujuan	Meningkatnya Ketertiban masyarakat	Presentase Penegakan Peraturan Daerah	%	100	100
Sasaran	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Presentase Penegakan Peraturan Daerah	%	100	100

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 mencakup 3 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2.) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya

2.) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2.) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3.) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5.) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material
- 6.) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7.) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2.) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2.) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3.) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
 - 2.) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3.) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan, Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 2.) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 3.) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - 4.) Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

- 1.) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
 - 2.) Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
 - 3.) Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota
- 1.) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 1.) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2.) Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- 1.) Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran
- c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- 1.) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen telah disusun sedemikian rupa untuk mencukupi kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	PAGU INDIKATIF	PAGU PERUBAHAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		16.549.019.700	13.661.072.788
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.839.343.700	6.730.069.800
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.000.000	27.150.000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000	17.150.000
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000	10.000.000
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.322.020.700	5.957.206.000
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.294.020.700	5.929.206.000
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.000.000	28.000.000
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		417.423.000	176.213.800
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja Kab Kebumen	165.000.000	151.213.000
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	252.423.000	25.000.000
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah		185.200.000	77.700.000
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.000.000	9.000.000
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000	24.000.000
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.000.000	9.000.000
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000	1.200.000
19	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000	10.000.000

20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130.000.000	22.500.000
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000	2.000.000
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		156.700.000	151.800.000
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.700.000	1.800.000
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000	120.000.000
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000	30.000.000
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		788.000.000	300.000.000
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240.000.000	240.000.000
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000	20.000.000
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	528.000.000	40.000.000
30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.940.000.000	40.000.000
31	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000	40.000.000
32	Pengadaan kendaraan dinas atau operasional	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.900.000.000	-
33	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6.223.497.616	6.345.677.112
34	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5.636.144.000	5.649.274.450
35	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.493.728.000	735.105.150
36	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.684.060.000	1.684.060.000
37	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000	73.614.000
38	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.383.356.000	3.156.495.300
39	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		577.353.616	689.423.262
40	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.583.000	66.583.000
41	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.471.000	22.471.000
42	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	488.299.616	600.369.262
43	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		10.000.000	6.979.400

44	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000	6.979.400
45	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1.486.178.384	585.325.876
46	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.422.920.384	526.433.676
47	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.213.355.384	475.090.876
48	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	209.565.000	51.342.800
49	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		17.954.000	16.638.600
50	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.954.000	16.638.600
51	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		45.304.000	42.253.600
52	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.304.000	42.253.600

Dari penjabaran rencana program dan kegiatan diatas, berikut paparan dari rumusan rencana program dan kegiatan yang akan di tampilkan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KAB. KEBUMEN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						16.549.019.700,00	13.661.072.788,00							22.046.468.150,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.549.019.700,00	13.661.072.788,00							22.046.468.150,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						16.549.019.700,00	13.661.072.788,00							22.046.468.150,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100,00 %	8.839.343.700,00	6.730.069.800,00						-	9.845.855.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-			13 dokumen	30.000.000,00	27.150.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-	-	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	20.000.000,00	17.150.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	-			100 %	5.322.020.700,00	5.957.206.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-	-	5.646.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	5.294.020.700,00	5.929.206.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		5.616.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	28.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				345 Orang	252.423.000,00	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		247.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	-			100 %	185.200.000,00	77.700.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-	-	179.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				137 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		10.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1064 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		27.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2390 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		10.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		1.380.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				203 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		1.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	130.000.000,00	22.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		126.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		2.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-			100 %	1.940.000.000,00	40.000.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-	-	2.546.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.900.000.000,00	-	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		2.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		46.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	156.700.000,00	151.800.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-	-	162.725.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				207 Laporan	6.700.000,00	1.800.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		1.725.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		138.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	788.000.000,00	300.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-	-	839.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		276.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i				4 Unit	528.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		540.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	-			100,00 %	6.223.497.616,00	6.345.677.112,00						-	8.410.567.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				124 Orang	75.000.000,00	73.614.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1.383.356.000,00	3.156.495.300,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		1.723.357.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1 laporan	2.493.728.000,00	735.105.150,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusifitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		5.895.398.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal	-			3 kegiatan	577.353.616,00	689.423.262,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusifitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	Masyarakat/Badan Usaha/Badan Hukum/ASN yang rawan melanggar Perda dan Perkada	-	650.312.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	66.583.000,00	66.583.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	Masyarakat/Badan Usaha/Badan Hukum/ASN yang rawan melanggar Perda dan Perkada		73.241.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	488.299.616,00	600.369.262,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	Masyarakat/Badan Usaha/Badan Hukum/ASN yang rawan melanggar Perda dan Perkada		552.353.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	22.471.000,00	22.471.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	Masyarakat/Badan Usaha/Badan Hukum/ASN yang rawan melanggar Perda dan Perkada		24.718.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota	-			1 kegiatan	10.000.000,00	6.979.400,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-	-	11.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	10.000.000,00	6.979.400,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusifitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		11.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	-			76,92 %	1.486.178.384,00	585.325.876,00						-	3.790.046.150,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/kota	-			100 %	1.422.920.384,00	526.433.676,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusifitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-	-	3.726.603.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	1.213.355.384,00	475.090.876,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusifitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		3.663.353.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	209.565.000,00	51.342.800,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusifitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		63.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	<i>Presentase terlaksananya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	-			100 %	17.954.000,00	16.638.600,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-	-	25.042.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran															
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran</i>				15 Dokumen	17.954.000,00	16.638.600,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningka tan kondusi vitas wilayah, ke mampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta penge mbangan nilai budaya masyarakat	-		25.042.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-			100 %	45.304.000,00	42.253.600,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-	-	38.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat															
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	45.304.000,00	42.253.600,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		38.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H							16.549.019.700,00	13.661.072.788,00							22.046.468.150,00	

BAB V

PENUTUP

Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat dapat diartikan bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost atau biayanya.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2025. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen serta peran aktif seluruh stakeholder Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen

IRA RUSMAYASARI, SH., M.Ec.Dev.
Pembina IV a
NIP.198004172006042015

LAMPIRAN

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Renja Tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Kebumen oleh Kasatpol PP Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Februari 2024
Jam : 09.00 s.d 11.00 WIB
Tempat : Aula Satpol PP Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2024

MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 23 Februari 2024

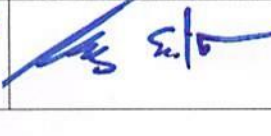
Pimpinan Sidang
KEPALA OPD SATPOL PP KABUPATEN KEBUMEN

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev



Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.		DPRD		
2.	CAHYO RIYADI	Unsur Perangkat Daerah	BAPPEDA	
3.	SUSIYANTO	Unsur Kecamatan	KEC. Prembun	
4.	HEKSA PRAMUDYA C.P	Unsur Lembaga	FORUM ANAK KAB. KEBUMEN	
5.	EDI SISWANTO	Unsur Masyarakat/ LSM	LINTAS KOMUNITAS PEDULI ODGJ	

DELEGASI OPD SATPOL PP PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
2024

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	TURIMAN	KEC. GOMBONG	GOMBONG	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila Nomor 40 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54312
Telepon (0287) 381885, Faksimile +6287 381423,
Laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,
Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

Kebumen, 19 Februari 2024

Nomor : 005 / 152
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Undangan

Yth 1. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
2. Kepala Kepolisian Resor Kebumen
3. Komandan KODIM 0709/Kebumen
4. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Jumat, 23 Februari 2024
waktu : Pukul 08.00 WIB s.d Selesai
tempat : Aula Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
acara : Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
keterangan : dimohon Hadir Tepat Waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev.
Pembina (IV/a)
NIP. 198004172006042015

TUJUAN SURAT

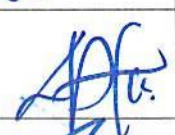
No.	Tujuan
1.	Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
2.	Kepala Kepolisian Resor Kebumen
3.	Komandan KODIM 0709/Kebumen
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
14.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Camat Gombong
16.	Camat Prembun
17.	Kepala Puskesmas Karanganyar
18.	Kepala Puskesmas Pejagoan
19.	Sruktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
20.	Rektor Universitas Putra Bangsa
21.	Forum Anak Kabupaten Kebumen
22.	Ketua Lintas Komunitas Peduli ODGJ

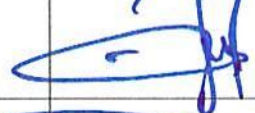
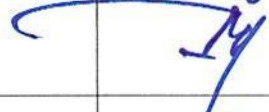
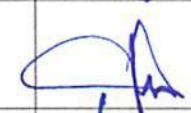
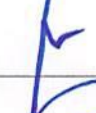
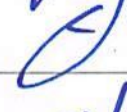
DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH SATPOL PP

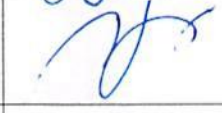
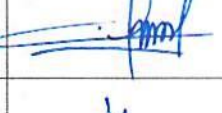
KABUPATEN : KEBUMEN

TANGGAL : 23 Februari 2024

TEMPAT : Aula Satpol PP Kabupaten Kebumen

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPN	TANDA TANGAN
1	SRI Mulyani	DPMTSP	Kbm	
2	Ardianto Purwandhono	DANDIM 0709	KEBUMEN	
3	PURDAS	Diparkimsub	Kbm	
4	Vicodo Hartanto	BPKPP	KBTg	
5	Wazinah	Inspektorat	Kebumen	
6	Siti Juliani	Dinas PMD	—	
7	Cahyo Riyadi	Bappeda	—	
8	Helisa Pramudya C.P.	Forum Anak Kab.	kebumen	
9	Juwati	Dinas P3A	kebumen	
10	Edi Siswanto	lintas Komunitas	kebumen	
11	Suyeng	Satpol PP		
12	Arif	AP		
13	Eddy Widawan	Polres	kebumen	
14	IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec. Dev	Satpol PP	kebumen.	

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPN	TANDA TANGAN
15	Sarif M	Satpol PP		
16	Muhammad	Kec. Gaseong		
17	Hayangk	Mipandy		
18	Junaid	Satpol Galsede		
19	Rokhmah E.	Satpol PP		
20	DEVI	KORPRI POL		
21	Taufik Hidayat	Kodim		
22	Eko Wapoyo	UPB		
23	TALHA	KORPRI	0812 26761109	
24	Hamanto	Kodim		
25	Andreas Puro	Pleu Pujaya.		
26	d USek	12th Cor Mgr		
27	Susanto	Kec Pambuk	081225850 162	
28	Aris Pambudi	Satpol PP		
29	Suparmi	- -		
30	Samsul . A	- -		
31	Heti p	BPRD	081341245	

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPN	TANDA TANGAN
32	ALI . F	KODIM		
33	Isnadi	Satpol PP		
34	Teguh Sabaryanto	Satpol PP		
35	Zuni Sutopo	Satpol PP		
36	Rahmat Bosda	Satpol PP		
37	TRI HARYUNI	SATPOL PP		
38	Okty Dwiyanarani	Satpol PP	Kebumen	
39	Darmawan	Satpol PP		
40	Dorry H	Satpol PP		
41	Surwati	Satpol PP		
42	Nosinta F	— — —		
43	Puji lestari	— — —	Kebumen	
44	Dewani Resti S	Satpol PP	Kebumen	
45	Ana Tri Susanti	— " —	kebumen	
46	Ika Yuanto Agung R	— " —	— " —	
47	Indhira Kusumawati	— " —	— " —	
48	Pandu Indrajit	— " —		

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPN	TANDA TANGAN
49	Eka EFriyanti	Satpol PP	Kebumen	
50	Friska Widiasti	Satpol PP	Kebumen	
51	Sayelati Hajar Kus	Satpol PP	Kebumen	
52	Mega Akmalia	Satpol PP	Kebumen	
53	Esti Wijayanti	Satpol PP	Kebumen	
54	Winarto	Satpol PP	Kebumen	
55	Achmad Hae ti	Satpol PP	Kebumen	

Kebumen, 23 Februari 2024
KEPALA SATPOL PP KABUPATEN KEBUMEN



IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.











PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. Indrakila No. 40 Kebumen Telp/WhatsApp 081382976581
Fax (0287) 381423 email satpolpp@kebumenkab.go.id
Kode Pos 54312 K E B U M E N

NOTULEN

Rapat : Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
Hari/Tanggal : 23 Februari 2024
Waktu Rapat : 08.00 s.d Selesai
Tempat : Aula Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

Bersama ini dengan hormat kami laporkan hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen T.A 2024.

A. Acara :

1. Pembukaan dengan membaca basmalah bersama.
2. Rapat di pimpin oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Kebumen dan Pleno di pimpin oleh Moderator Kabid Trantibumlinmas.
3. Peserta rapat sebanyak 57 orang terdiri dari Inspektorat, BPKPD, BAPPEDA, Bagian Pemerintahan semua pejabat Struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, OPD terkait, Unsur LSM, Unsur Akademisi dan Unsur Masyarakat.
4. Materi Forum OPD adalah pemaparan Rencana kerja tahun 2025 :
 - a. Dasar Hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja :
 - 1) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2) PP No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3) PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 4) Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - 5) Perda Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - 6) Peraturan Bupati Kebumen No. 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Satpol PP berdasarkan Perbup No 115 Tahun 2021 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
6. Arah Kebijakan Tahun 2025 Kabupaten Kebumen Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.
7. Keterkaitan Program Renja Satpol PP Kabupaten Kebumen dengan Visi Misi Pemda sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan;
 - b. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum terdiri dari 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan, dan;
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan.
8. Arah dan masukan dari BAPPEDA (Cahyo) : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan tema “Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia”. Perangkat Daerah wajib menyusun inovasi (minimal 1 program 1 inovasi) dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja. Setiap inovasi akan dituangkan dalam kedalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Pagu Anggaran yang dibagikan ke pada OPD belum termasuk anggaran untuk P2K.
9. Arah dan masukan dari BPKPD (Viado Hartanto) : Mengedepankan aspek layanan dasar dan mandatory spending. Tahun 2025 di proyeksikan untuk kenaikan belanja sebesar 4,79 % target belanja naik tapi anggaran belanja turun karena untuk sementara pagu P2K di simpan dahulu menghitung kebutuhan P2K Kabupaten Kebumen. Beberapa upaya untuk optimalisasi belanja daerah yang pertama merencanakan anggaran dengan cermat dan bisa memproyeksikan kapan waktu pelaksanaan, meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja.

10. Paparan Renja Tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Kebumen (Kepala Satpol PP):
Pagu Indikatif Tahun 2025 Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebesar
Rp.9.469.231.700,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Gaji dan Tunjangan ASN : 3.188.932.700,-
- b. Tamsil ASN : 2.105.088.000,-
- c. Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) : 300.000.000,-
- d. Belanja Operasional OPD : 3.295.891.000,-
- e. Belanja Prioritas OPD:
 - 1) Penyusunan Renstra : 12.000.000,-
 - 2) PAM Pilkades : 559.320.000,-

11. Tanggapan/Tanya Jawab

- a. Kodim 0709 (Bapak Ardiantani) :
 - 1) Dalam pelaksanaan tugas SOP harus dilaksanakan dengan baik supaya tidak berbenturan dengan masyarakat karena keamanan dan keselamatan persronil sangat penting.
 - 2) Kunci dalam melaksanakan tugas di dukung dengan SDM yang mumpuni dan setiap kegiatan harus di dukung dengan anggaran.
- b. Polres Kebumen (Bapak Edi) : Kendala dan permasalahan yang terjadi tahun 2024 sebagai bahan evaluasi dalam merencanakan kegiatan di tahun berikutnya sehingga dapat terbentuk rencana kegiatan di tahun 2025 lebih baik.
- c. Kecamatan Gombong (Bapak Turiman) : memberikan tanggapan terkait dengan penanganan ODGJ dan anggaran Bansos untuk anggota satlinmas.
- d. Forum Anak Indonesia (Heksa Pramudya Cahya P) :
 - Memberikan tanggapan terkait penanganan anak-anak punk yang mengganggu kenyamanan adakah ada solusi dari Satpol PP dan apakah solusi tersebut masih memperhatikan hak-hak anak.
 - Partisipasi anak terhadap layanan satpol pp, apakah anak bisa melakukan pengaduan ke satpol PP dan Forum Anak Indonesia menawarkan kerjasama.
- e. DPMPSTSP (Ibu Yani) : memberikan tanggapan dan mendukung usulan Satpol PP terkait lahan parkir mengingat kendaraan Operasional Satpol banyak dan belum memiliki lahan parkir yang representatif.

Tanggapan :

- a. Dinsos : Penanganan ODGJ yang terus berulang dimasukan ke rumah singgah tidak ada batas waktu sampai kondisi sembuh baru pulang.
- b. Puskesmas Pejagoan : ODGJ yang diterima dilakukan assesment maksimal 5 hari apabila dalam kurun waktu 5 hari belum baik akan dirujuk ke RSJ. Untuk pengobatan koordinasi dengan Baznas.
- c. Puskesmas Karanganyar : Kerjasama dengan pengirim ODGJ, setelah 5 hari ada keputusan akan diserahkan kemana dan masih butuh solusi bersama terkait hal tersebut.
- d. Komunitas Peduli ODGJ : Tempat penyaluran/rehabilitasi ODGJ berupa tempat pertanian agar ODGJ bisa berkembang berlokasi di Kedunggong, dan yang menjadi kendala terkait hal penanganan ODGJ pihak keluarga tidak mau menerima.
- e. Kepala Satpol PP :
 - Setiap ada pengaduan penanganan yang berkaitan dengan trantibumlinmas segera di tindaklanjuti.
 - Bansos yang diberikan kepada anggota satlinmas berdasarkan anggaran yang tercantum di DPA berdasarkan nama dan alamat yang sudah di usulkan sebelumnya.
 - Penanganan terhadap anak-anak punk di kembalikan ke keluarga disekolahkan dan mendapatkan hak-hak lain seusi hak anak seusianya.

12. Kesimpulan

- a. Peserta Forum Perangkat Daerah Satpol menerima dan menyetujui Renja Satpol PP dan mendukung kegiatan Satpol PP.
- b. Penyusunan Renja akan disempurnakan sesuai kebutuhan.

13. Forum Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten menyepakati untuk menunjuk Delegasi OPD Satpol PP Pada Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Bapak Turiman dari Kecamatan Gombang.

14. Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.

Yang Melaporkan



Teguh Sabaryanto, S.IP.,M.Acc.